

**KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK
MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA
PASCA REFORMASI 1998-2008**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora**

Oleh:

**Ahmad Sidik Tri Haryanto
NIM: 04121950**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sidik Tri Haryanto
NIM : 04121950
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Konsentrasi : Sejarah
Judul : Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta
Pasca Reformasi 1998-2008

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini merupakan hasil jiplakan, maka gelar dan Ijazah yang diberikan oleh universitas dapat dibatalkan.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Saya yang menyatakan



Ahmad Sidik Tri Haryanto
NIM 04121950

Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag

Dosen Fakultas Adab

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Ahmad Sidik Tri Haryanto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Adab

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sidik Tri Haryanto
NIM : 04121950
Judul Skripsi : Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998-2008

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Oleh karena itu, kami berharap skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat disidangkan dalam sidang munaqasyah.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag
NIP. 19580117 198503 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 1319 /2010

Skripsi dengan judul : Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998 - 2008

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Ahmad Sidik Tri Haryanto**
NIM : 04121950
Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag
NIP. 19580117 198503 2 001

Penguji I

Dr. Muh. Wildan, MA
NIP. 19710403 199603 1 001

Penguji II

Riswinarno, SS, MM
NIP. 19700129 199903 2 001

Yogyakarta, 6 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya

DEKAN



Prof. Dr. G. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.

NIP. 195209211984031001

MOTTO

“Jadilah seperti air yang selalu bermanfaat bagi semuanya dan selalu membasahi untuk saling menasehati “

**Hidup adalah anugrah untuk disyukuri
Hidup adalah janji untuk ditepati
Hidup adalah pertandingan untuk dimenangkan
Hidup adalah rintangan untuk dijalani
Hidup adalah pilihan**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak beserta keluarga dan adik atas curahan kasih sayang dan doa yang memberikanku kekuatan untuk terus berjuang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi dengan judul “Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998-2008” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Syhabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
2. Dr. Maharsi, M.Hum. dan Dr. Imam Muhsin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.
3. Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag. selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan perpustakaan Fakultas Adab yang telah membantu penulis dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak H. Budi Setyagraha beserta Istri dan narasumber lain yang telah memberikan waktunya untuk wawancara dan membantu penulis dalam pengumpulan data
7. Keluarga besarku, Bapak Mukarto, Ibu Badillah, Teh Dewi, teh Yani sekeluarga, adikku Aminatus Solikhah dan Irwanto, si bungsu Ahmad Fauzi Abdillah, Neng Riska

dan buat Eka Sri Isnawati atas hangatnya kasih sayang, pengertian, dan semua dukungannya kepada penulis agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Sahabat-sahabat, mas Mukhlis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Usman Bueto beserta istri, Reyhan (simbah), Delih (si Kabayan), mas Dani. Juga buat teman-teman SKI angkatan 2004. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Terima kasih atas motivasi, bantuan, dan dukungannya.

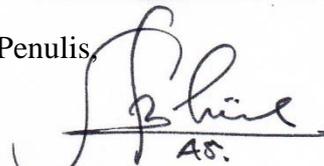
9. Pendekar, senior sabuk biru, sahabatku Zaman (Metekol), Doni (Dono), Erwin, dan teman-teman di PPS.CEPEDI yang telah memberikan segudang ilmu dan prestasi serta motivasi dan spirit yang sangat besar.

10. Terakhir buat KKY (Keluarga Karawang Yogyakarta) temen-temenku Hery, Rizal, Jeri dan pengurus KKY semuanya, terima kasih atas perhatian dan pengertiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga amal baik mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.S.' or similar, with a horizontal line underneath.

Ahmad Sidik Tri Haryanto

NIM.04121950

KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA PASCA REFORMASI 1998-2008

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di bumi nusantara ini bukan hanya kebudayaan asli Indonesia melainkan juga ada kebudayaan luar yang turut memperkaya kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). salah satu kebudayaan luar yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kebudayaan Tionghoa, baik yang beragama muslim maupun non muslim.

Tidak ada catatan pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang ke negeri Indonesia (Nusantara). Namun yang pasti bangsa Tionghoa telah ribuan tahun mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah satu catatan-catatan tertua ditulis oleh seorang agamawan, I Ching pada abad ke-7. I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan menyusuri Siam, Semenanjung Indocina, Semenanjung Melayu dan akhirnya tiba di Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta.

Dalam sejarahnya, orang-orang Tionghoa memang telah lama tinggal di Indonesia. Hanya saja warga Tionghoa ini seringkali di tempatkan diluar, dan mereka adalah kaum yang mendapat lebel non-pribumi, warga Tionghoa acap kali tidak diperdulikan oleh penduduk asli Indonesia karena etnis Tionghoa memang merupakan kaum minoritas yang jumlahnya terbilang cukup sedikit di negeri berpenduduk lebih dari dua ratus juta ini.

Selama bertahun-tahun sebelum reformasi 1998, pemerintah RI sering membuat berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa baik yang beragama muslim maupun non muslim, puncaknya terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan etnis Tionghoa ini mulai di akui oleh masyarakat asli Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Hal ini di tandai dengan adanya beberapa aturan yang membelenggu warga Tionghoa telah di cabut. Sejak saat itu hari raya imlek bebas dirayakan dan adanya peringatan dalam menyambut hari raya yang dianggap penting oleh kaum Tionghoa ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini merasa perlu untuk mencoba melihat lebih jauh bagaimana kehidupan sosial politik etnis muslim Tionghoa di Yogyakarta pasca-reformasi yang hidup dinamis dengan warga pribumi di bandingkan dengan kota-kota lain. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih pluralis, demokratis, dan berwawasan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder, serta studi lapangan (field research), dengan menggunakan tehknik dokumentasi, wawancara, dan observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap aktivitas warga muslim Tionghoa itu sendiri. Sementara literatur primer berupa karya-karya yang terkait dengan kewarga negaraan etnis Tionghoa baik dalam buku, jurnal, maupun artikel, dan sumber pendukung berupa buku-buku, literatur, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya yang di tulis oleh para sejarawan, khususnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara sifat penelitian ini berupa

deskriptif-analitis, yakni mencari permasalahan melalui analisa yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di negeri mengalami harmonisasi yang cukup efektif, baik dari segi agama, budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. Artinya negara memperlakukan cukup adil untuk semua golongan dan etnis, hal itu juga diatur dalam undang-undang tentang kewarganegaraan terutama pasca-reformasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, keberadaan etnis Tionghoa juga memberikan kontribusi yang cukup urgen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam mengawal nilai-nilai pluralitas dan demokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematikan Pembahasan	24
BAB II : KOMUNITAS TIONGHOA DI INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH	27
A. Masuknya Etnis Tionghoa ke Indonesia	27
B. Islamisasi di Kalangan Komunitas Tionghoa	34
C. Relasi Komunitas Etnis Tionghoa dengan Pribumi di Yogyakarta	40
D. Komunitas Etnis Tionghoa di Yogyakarta	45
BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA	49
A. Era Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)	49
B. Era Orde Lama	53
C. Era Orde Baru	61
D. Era Reformasi	67
BAB IV : PERAN MUSLIM TIONGHOA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN POLITIK DI YOGYAKARTA	72
A. Relasi Muslim Tionghoa dengan Warga Yogyakarta	72
B. Peran Muslim Tionghoa dalam Perubahan Sosial di Yogyakarta	81
C. Peran Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta	90

BAB V : PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang dihuni lebih dari 200 juta umat manusia dari Sabang sampai Merauke, terbentang di atas ribuan pulau sejauh lebih dari 5000 kilometer, dengan ratusan bahasa, suku, adat-istiadat, budaya, serta beraneka ragam agama yang terdapat di dunia juga ada di negara kepulauan ini.¹ Kesemuanya itu, merupakan elemen penting yang turut mengkonstruksi Indonesia seperti sekarang ini, sehingga barangkali, tidaklah cukup mengatakan sebagai Indonesia jika kita menafikan adanya pluralitas tersebut.

Pluralitas Indonesia merupakan kekayaan sekaligus modal sosial (*social capital*) yang teramat berharga yang semestinya disyukuri dan dirawat. Keragaman tersebut justru akan membawa malapetaka bagi negeri ini jika tidak dikelola dengan baik. Selama ini perbedaan-perbedaan tersebut relatif tidak sampai merobek keutuhan dan kesatuan bangsa, meskipun acap kali mengalami kegoncangan, gangguan dan benturan. Keindahan dan kedamaian dalam perbedaan tersebut tentu saja tidak lepas dari pemahaman yang cukup mendalam terhadap makna pluralisme atau kemajemukan. Berbeda bukan berarti harus bertentangan. Beragam budaya, bahasa, keyakinan dan kelas sosial bukan bermakna harus saling berperang. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru memiliki makna yang mendalam untuk membangun kekuatan yang lebih besar.

¹Donald K. Emmeson (ed), *Indonesia, Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. xxi.

Upaya menyatukan keberagaman bangsa bukanlah tindakan dengan harga gratis, tetapi telah menjadi sejarah yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan telah menguras otak dan energi para pendiri republik bernama “Indonesia” ini. Jauh sebelum negeri ini merdeka, bangsa Cina yang biasa disebut etnis Tionghoa—sebagai bagian dari keberagaman negeri ini—sudah bermukim dan berbaur dengan masyarakat sekitar.² Mereka melebur menjadi “warga setempat” yang memiliki dinamika tersendiri dalam relasi dengan warga pribumi di Indonesia.

Sekalipun tidak ada dokumen mengenai kapan pastinya orang-orang Tionghoa masuk Nusantara, berbagai catatan mengemukakan bahwa pada abad ke-14 di Jakarta (dulu Sunda Kelapa) telah ditemukan penduduk berkulit putih dengan mata rata-rata sipit ini. Begitupun, gelombang kedatangan besar-besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi pada Abad XVI (di Jawa)³ dan Abad XIX (di Sumatera)⁴. Mereka rata-rata meninggalkan negeri mereka akibat kesusahan hidup dan perang berkepanjangan.

² Jumlah populasi komunitas etnis Cina di Indonesia ada yang mengatakan nomor tiga terbesar setelah komunitas Jawa dan Sunda. Dari hasil sensus penduduk tahun 2000 yang mencatat latar-belakang etnis seseorang, sesungguhnya komunitas Cina hanyalah nomor 15 dari 101 kelompok etnis yang tercatat di sana. Jumlahnya pun dikatakan hanya sebesar 1.738.936 orang atau 0,86% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia sebanyak 201.092.238 orang. Namun, paling tidak hasil sensus menunjukkan bahwa di 11 propinsi Indonesia, jumlah warga etnis Tionghoa cukup signifikan untuk diperhitungkan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Dinyatakan bahwa 26,45% dari jumlah seluruh warga etnis Tionghoa di Indonesia, tinggal di Jakarta yaitu 460.002 orang (5,53% dari seluruh penduduk Jakarta). Begitu juga di Kalimantan Barat, ada 20,30% dari seluruh warga Tionghoa Indonesia (9,46 % dari seluruh penduduk Kalimantan Barat, nomor 3 terbesar setelah etnis Sambas, dan lainnya). Di Bangka-Belitung, warga etnis Tionghoa adalah 11,54% dari seluruh penduduk kepulauan itu, nomor 2 setelah etnis Melayu. Lihat: Benny G.Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (kata pengantar Daniel S.Lev) (Jakarta: Elkasa, 2003), hlm. 113.

³*Ibid.*, hlm. 81.

⁴*Ibid.*, hlm. 215.

Sebelum reformasi 1998 bergulir, komunitas etnis Tionghoa dilukiskan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Semasa Orde Baru berkuasa, etnis Tionghoa menjadi warga yang terlecehkan, tersingkirkan, dan termarginalkan dalam tata hubungan antar warga masyarakat di negeri ini. Potret buram etnis Tionghoa begitu kentara dalam perjalanan sejarah Indonesia. Periodeanya sangat panjang (*longue durée*), diawali dengan kedatangan nenek moyang orang Tionghoa mulai abad IX yang akhirnya diikuti migrasi besar-besaran dari Tiongkok abad XIX sampai awal abad XX.⁵

Pada era Orde Lama, keluar PP. No. 10 tahun 1959 yang melarang warga negara asing (WNA) Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965.

Sementara pada masa Orde Baru berkuasa, terdapat penerapan ketentuan tentang SBKRI, yang kadang dipelesetkan menjadi “Surat Bukti Kebodohan Republik Ini” dari arti yang sebenarnya yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. SBKRI ini menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang “masih dipertanyakan”.

⁵Dennis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Trj.* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 200.

Di samping itu, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Inpres No. 14 tahun 1967⁶ yang disusul SKB tiga menteri: Menteri Agama (waktu itu) H. Alamsjah Ratu Perwiranegara; Menteri Dalam Negeri (ketika itu) Amir Machmud; dan Jaksa Agung (ketika itu) Ali Said. Dalam lampirannya disebutkan “Proses pembauran kehidupan di Indonesia berlangsung wajar, walaupun tidak menutup kemungkinan timbul hambatan psikologis, terutama bagi warga negara keturunan Tionghoa. Hal ini karena adanya hambatan budaya yang dihayati sebagian dari mereka atau nenek moyang mereka pada umumnya yang berkiblat ke negeri Cina, sekalipun mereka telah berabad-abad menjadi penduduk Indonesia. Keadaan ini diperkirakan akan menjauhkan kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun mereka adalah warga negara Indonesia dan bukan warga negara Cina”.⁷

Inpres No. 14 tahun 1967 yang disusul SKB tiga menteri di atas praktis membelenggu kehidupan keagamaan dan kultural masyarakat Tionghoa di Indonesia. Jelasnya, masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak boleh lagi melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan leluhur mereka (Konghucu) dengan, misalnya, menampilkan tapekong dan barongsai dalam perayaan Tahun Baru Imlek.

Kisah buram etnis Tionghoa Indonesia juga berkenaan dengan status minoritas kelompok ini dalam pencarian identitas mereka. Prof Daniel Lev menyinggung soal etnis/kelompok minoritas yang di mana-mana selalu menjadi sorotan bahkan korban (kambing hitam), dan dianggap sebagai

⁶Inpres yang berisi tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Tionghoa tersebut dikeluarkan Presiden H. Muhammad Soeharto tanggal 6 Desember 1967.

⁷<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/smcetak>, diakses pada 6 Mei 2010.

sumber semua keburukan. Menurut Daniel Lev, sebagaimana dikutip Benny G. Setiono, ketika pada awal abad XX seorang jurnalis Belanda mencari tahu penyebab kemiskinan di Hindia Belanda, ternyata yang disalahkan bukan pemerintah kolonial melainkan etnis Tionghoa.⁸

Sejarah mencatat, dalam perjalanan negeri ini, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan seperti pembantaian Tionghoa pada masa perang Jawa 1825-1930, pembantaian di Batavia 1740, yang menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa oleh pasukan VOC dan ratusan rumah dijarah dan dibakar semena-mena. Darah dan mayat korban pembunuhan itu memenuhi sungai yang hingga kini dinamakan kali Angke. Benny G. Setiono mencatat, dalam kerusuhan yang berlangsung selama dua minggu tersebut tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa telah dibunuh dengan cara disembelih, dibakar hidup-hidup, dan ditembaki. Pembunuhan massal etnis Tionghoa di Jawa 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974, dan terakhir Tragedi Mei 1998, merupakan noda hitam sejarah masa lalu negeri ini.⁹

Pada masa Kebangkitan Nasional tercatat, misalnya, Peristiwa Kudus 1918. Hanya karena disulut oleh perkelahian antara beberapa pemuda Tionghoa dengan anggota Sarekat Islam (SI)—itu pun telah berhasil dilerai—tanggal 31 Oktober 1918 ribuan massa SI dari Kudus dan sekitarnya (Jepara, Pati, Demak, dll) menjarah dan membakar rumah-rumah, toko dan pabrik milik orang Tionghoa.¹⁰

⁸Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Elkasa: Jakarta, 2002), hlm. 571.

⁹*Ibid.*, hlm. 119.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 375.

Pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa juga terjadi tahun 1946 yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Tangerang. Dalam kerusuhan yang terjadi selama 5 hari (3 Juni s.d. 8 Juni 1946) itu tak kurang dari 600 orang Tionghoa dibunuh, lebih dari 1.000 rumah orang Tionghoa dibakar dan sekitar 25.000 orang Tionghoa harus mengungsi dari Tangerang ke Jakarta.¹¹

Pada akhir 1980—tepatnya 22-23 November 1980—penjarahan, perusakan dan pembakaran rumah, toko dan kendaraan milik orang Tionghoa terjadi di Solo. Kerusuhan rasial di atas hanya dipicu oleh perkelahian antara 3 siswa Sekolah Guru Olah Raga (SGO) dan seorang pemuda Tionghoa. Kerusuhan, penjarahan, perusakan dan pembakaran itu bahkan kemudian juga menjalar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga Semarang. Puluhan milyar rupiah diperkirakan hangus sia-sia sebagai kerugian akibat kerusuhan di atas.¹²

Kisah buram etnis Tionghoa Indonesia tersebut telah melupakan sejarah asimilasi yang terserap berabad-abad lamanya di negeri yang dihuni lebih dari 200 juta umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada masa revolusi tahun 1945-an kita telah menyaksikan perjuangan sikap nasionalisme Djiaw Kie Siong yang memperkenankan rumahnya dipakai untuk rapat mempersiapkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdapat 5 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan

¹¹*Ibid.*, hlm. 577.

¹²*Ibid.*, hlm. 1028.

Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan Drs. Yap Tjwan Bing yang ikut merumuskan UUD 1945.¹³

Di samping itu, kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda juga tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 terbentuk di Batavia *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yang mendirikan sekolah-sekolah tahun 1908 yang jumlahnya mencapai 54 buah dan tahun 1934 telah mencapai 450 sekolah. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan *Djamiatul Chair* meniru model THHK. Pada gilirannya hal ini diikuti priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

Dalam perjuangan fisik maupun nonfisik banyak pahlawan dari etnis Tionghoa yang terjun langsung dalam upaya memerdekakan republik ini, “*Republik Lanfong*”, misalnya, adalah sebuah organisasi etnis Tionghoa yang berperang melawan pasukan Belanda pada abad XIX, tetapi sayang namanya tidak banyak dicatat bahkan kerap kali dikambinghitamkan.

Reformasi 1998 membawa angin segar bagi etnis Tionghoa. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—yang merupakan figur paling berjasa bagi etnis Tionghoa Indonesia—diterbitkan Kepres No 6/2000 yang ditandatangani pada 17 Januari 2000 sembari mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang diteken Presiden Soeharto pada 6 Desember 1967. Inpres yang dikeluarkan Presiden Soeharto berisi pelarangan ekspresi serta

¹³Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 144. Lihat juga dalam Imam Muhlis, “Islam dan Pancasila: Perspektif Ahmad Syafii Maarif,” *Jurnal Maarif*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2008), hlm. 75.

kepercayaan Tionghoa di depan umum. Inpres itu membuat Kongfutzu tidak diakui di bumi Nusantara. Atraksi barongsai dan liong (tari naga) tidak dapat secara bebas dilakukan pada masa Orde Baru. Pada era Megawati Soekarnoputri juga dikeluarkan Kepres No 19/2002 tertanggal 9 April 2002 yang meresmikan Imlek sebagai hari raya nasional.¹⁴

Sementara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode I juga telah diterbitkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada 1 Agustus 2006 tahun lalu, tentang Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 yang isinya,

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”¹⁵

Logikanya, kalau sudah dinyatakan asli berarti hak dan kewajibannya sama. Juga tidak boleh terjadi lagi diskriminasi perlakuan dalam hal akte kelahiran, bukti kewarganegaraan, ganti nama, KTP, urusan imigrasi, dan lain-lain sebagainya. Dengan memberi landasan hukum yang kuat terhadap paham kebangsaan dan kewarganegaraan berakhir pulalah semua bentuk dan praktik diskriminasi berdasarkan ras dan etnik.

Generasi muda saat ini rasanya perlu melihat kembali sejarah untuk belajar, sikap saling menghargai dan menghormati serta kerja sama tetap lebih baik daripada prasangka buruk, konflik, dan benturan peradaban. Apalagi jika

¹⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2002 Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Lihat, <http://www.legalitas.org>, diakses pada 6 Mei 2010.

¹⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

mencermati *trend* global yang berkembang akhir-akhir ini, kita masih dihantui ancaman bangkitnya kembali politik identitas yang menonjolkan superioritas agama atau etnis tertentu. Untuk itu, kita perlu menengok kembali sejarah, khususnya sejarah interaksi Tionghoa dan pribumi di negeri ini, untuk dijadikan cermin. Dari sejarah diketahui, sebelum Belanda menjajah negeri ini, sebenarnya konflik Tionghoa, Nusantara dan Islam tidak begitu terlihat. Jadi, pada abad XVI atau XVII, ada harmoni dan sinergi antara Islam dan Tionghoa di bumi Nusantara ini.¹⁶ Bahkan, etnis Tionghoa diakui perannya ikut menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini.

Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah di Demak, dengan raja pertama Raden Patah atau Jin Bun, anak Brawijaya, dari istrinya yang berasal dari Tionghoa. Di masjid Demak atau beberapa klenteng di pantai utara Jawa masih bisa dilihat sisa-sisa akulturasi budaya Islam dan Tionghoa. Dennis Lombard dalam buku *Nusa Jawa: Silang Budaya*, memaparkan secara panjang lebar bahwa bukan hanya dalam level agama saja ada hibriditas atau ketercampuran budaya yang saling memperkaya Tionghoa dan kultur setempat di Nusantara, tetapi juga dalam pertanian, makanan, pakaian, dan aspek budaya lainnya.¹⁷

¹⁶Sejarah panjang relasi Islam dan Tionghoa di bumi Nusantara sejak awal sudah memperlihatkan dan memanfaatkan piranti-piranti budaya yang sudah mengakar di tengah masyarakat terbukti jauh lebih berhasil, ketimbang dengan upaya pemaksaan. Salah satu tesis yang mendukung tentang Islam yang toleran dan harmonis adalah tesis yang diajukan oleh Azyumardi Azra tentang masuknya Islam ke Indonesia. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dengan jalan *penetration pacifique* (penetrasi damai). Azyumardi Azra, "Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia", Makalah disampaikan pada Orasi Budaya, diselenggarakan oleh *Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies* (IMPULSE), Yogyakarta, 30 Agustus 2007.

¹⁷Dennis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, hlm. 201.

Komunitas etnis Tionghoa Indonesia pada era reformasi ini boleh bernafas lega karena mendapat perlindungan hukum yang kuat atas status kewarganegaraannya. Ini sebuah karya monumental anak bangsa yang mengubah paradigma perilaku. Betapa tidak, sekarang keaslian bangsa Indonesia tidak lagi ditandai oleh ciri-ciri fisik yang menjadi bawaan garis etniknya. Itulah kekayaan negeri ini, Indonesia multi-etnis.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan di atas, kajian ini berusaha menelusuri rekam jejak interaksi Tionghoa dengan pribumi. Karya ilmiah ini juga akan mencoba memberikan deskripsi mengenai sejarah dan dinamika Tionghoa dengan pribumi dalam rentang yang cukup panjang. Kemudian penulis mencoba melihat dan mencermati lebih mendalam posisi etnis Tionghoa pasca reformasi 1998, baik dari sisi politik, ekonomi maupun sosial dan budaya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun mencoba mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana dinamika kehidupan komunitas etnis Tionghoa di Indonesia?
2. Bagaimana proses Islamisasi di kalangan etnis Tionghoa?
3. Bagaimana kehidupan sosial-politik Muslim Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca reformasi 1998-2008?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelusuri rekam jejak komunitas Muslim-Tionghoa di Yogyakarta. Kajian ini merupakan kajian yang cukup penting untuk dapat melihat proses perkembangan Tionghoa secara lebih komprehensif, karena sejarah muslim Tionghoa di Indonesia memiliki kontribusi terhadap pewarnaan Islam di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. mendeskripsikan dan menelusuri rekam jejak komunitas Muslim-Tionghoa di Yogyakarta, terutama pasca reformasi 1998
- b. menjelaskan sejarah serta aktivitas komunitas Muslim Tionghoa di Yogyakarta dalam interaksi dengan komunitas lain, khususnya dengan umat Islam.
- c. mencoba membedah sejauh mana kontribusi komunitas Muslim Tionghoa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam wilayah sejarah perkembangan komunitas Muslim-Tionghoa dan multikulturalisme di negeri ini.

- b. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang multikulturalisme dan masalah Tionghoa.
- c. menjadi pedoman bagi para pemerhati sejarah komunitas Muslim Tionghoa di masa depan.

D. Kajian Pustaka

Diskursus seputar komunitas Muslim-Tionghoa telah banyak dikupas oleh para ilmuwan, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, politik maupun budaya. Akan tetapi, pembahasan tentang sejarah serta kondisi sosial-politik Muslim-Tionghoa pasca reformasi 1998 masih sangat jarang atau bahkan belum ada sama sekali yang mengkaji secara komprehensif tentang kehidupan sosial-politik komunitas Islam-Tionghoa di Yogyakarta.

Literatur yang bisa peneliti temukan antara lain tulisan Benny G.Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*.¹⁸ Buku ini mencoba berbicara tentang kondisi etnis Tionghoa di Indonesia dalam dunia politik praktis serta peranan etnis Tionghoa mulai abad XVI hingga menjelang masa reformasi.

Buku yang berjudul *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*,¹⁹ merupakan kajian sejarah pemikiran politik etnis minoritas Tionghoa di Indonesia yang menunjukkan bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi dan perubahan zaman. Selain itu, buku ini juga menerangkan perihal sikap dan respon negara Indonesia terhadap komunitas etnis Tionghoa serta pemikiran

¹⁸Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Elkasa: Jakarta, 2002).

¹⁹Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa* cet-I (Jakarta: LP3ES, 2002).

politik etnis Tionghoa dan identitas mereka. Buku yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam *Dilema Minoritas Tionghoa*²⁰ yang membahas tentang keadaan yang dialami masyarakat Tionghoa sejak kemerdekaan sampai Orde Baru. Buku ini juga membahas tentang identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

Buku *Etnis Tionghoa Asli dan Pembangunan Bangsa*.²¹ Buku ini menceritakan peranan etnis tionghoa asli atau totok dan etnis Tionghoa peranakan (Islam maupun lainnya) dalam pembagunan bangsa, dan juga dipaparkan tentang hubungan antara keduanya, tetapi penjabarannya tidak terlalu luas membahas aktivitas etnis Tionghoa.

Selain buku di atas, Leo Suryadinata juga sangat konsen terhadap permasalahan komunitas Tionghoa. Di antara karya yang telah diterbitkan adalah: *Politik Tionghoa Peranakan Jawa*.²² Ada juga buku *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San sampai Yap Thian Hien*.²³ Buku ini mengulas tentang pencarian identitas etnis minoritas Tionghoa di Indonesia serta faktor penyebab tumbuh suburnya politik rasialis di Indonesia. Leo juga banyak memberikan solusi untuk masalah tersebut.²⁴

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifangi dalam *Jurnal Penelitian Agama* yang berjudul “Pembauran China Muslim di Wilayah Kota Yogyakarta” (2001), membahas tentang proses pembauran

²⁰Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984).

²¹Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa Asli dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999).

²²Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1895), hlm. 34.

²³Leo Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian Hien* (Jakarta LP3ES), hlm. 56.

²⁴Leo Suryadinata, “Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya”, dalam Riyanto Wahono (ed), *70 Tahun Junus Yahya: Pribumi Kuat Kunci Pembauran* (Jakarta: Bima Rena Pariwara, 1997).

China-Muslim terhadap pribumi dan masyarakat sekitar di kota Yogyakarta. Proses pembauran tersebut lewat proses perkawinan serta penggunaan bahasa Jawa sebagai proses interaksi sosial. Hal ini tidak ada kesamaan dengan penelitian penulis, sebab artikel tersebut membahas tentang pembauran China-Muslim, dan tidak mengupas soal kondisi kehidupan sosial-politik Muslim-Tionghoa pasca-reformasi 1998. Sementara buku *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa (1998)*, memaparkan tentang kondisi ekonomi etnis Tionghoa serta strategi dan siasat bisnis etnis Tionghoa.

Ada kajian berupa skripsi yang berjudul “*Relasi Muslim Tionghoa Dan Tionghoa Non Muslim di Kodya Yogyakarta*” yang ditulis oleh Triana Yudawati (2002).²⁵ Dalam skripsi ini dipaparkan bagaimana Muslim-Tionghoa berhubungan dengan Tionghoa yang berbeda agama, serta menjelaskan adanya etika moral dalam perbedaan agama. Namun dalam penulisan tersebut tidak dipaparkan adanya kondisi sosial-politik pasca reformasi 1998.

Itulah beberapa tulisan mengenai Muslim-Tionghoa dan hubungannya dengan etnis lain. Oleh karena itu, sejauh penelusuran penulis, belum ada tulisan yang secara khusus mengulas tentang sejarah kondisi etnis Muslim-Tionghoa pasca reformasi 1998 terutama di Yogyakarta. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang peran etnis Muslim-Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara serta dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada publik berkenaan dengan komunitas Muslim-Tionghoa di Yogyakarta khususnya.

²⁵“*Relasi Muslim Tionghoa dan Tionghoa Non-Muslim di Kodya Yogyakarta*” Skripsi, Triana Yudawati, (Yogyakarta: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2001).

Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai beberapa kekhususan; *Pertama*, mengkaji perjalanan etnis Tionghoa dari sisi sejarahnya. *Kedua*, relasi etnis Tionghoa serta proses islamisasi di komunitas etnis Tionghoa dan *ketiga*, akan mengkaji tentang kondisi sosial politik etnis Tionghoa di Wilayah Istimewa Yogyakarta pasca reformasi 1998.

E. Karangka Teori

Hubungan antar etnik sering diidentikkan dengan konflik sosial. Menurut William Chang timbulnya konflik sosial yang bernuansa etnis dan rasial tidak hanya melukai keutuhan bangsa, tetapi juga mencabik kodrat keutuhan bangsa. Gejala etnonasionalisme tampaknya bakal menggerogoti keutuhan bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan dan kecurigaan di antara sesama warga bangsa yang kesemuanya ini menjadikan kehidupan bangsa tidak kondusif.²⁶

Konflik sosial yang muncul dalam masyarakat majemuk sebenarnya bukan merupakan peristiwa yang luar biasa. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi bangsa Indonesia akibat perbedaan-perbedaan, baik etnis, fisik, adat-istiadat, bahasa, maupun budaya. Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah besar kecilnya intensitas konflik karena kesemua ini berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman hidup sebagai sebuah bangsa. Ibarat api dalam sekam, konflik sosial yang terjadi selama ini hanya dapat dipadamkan pada permukaannya, sementara di dalamnya masih

²⁶William Chang, *Etnonasionalisme* (6),. (Jakarta: Harian Umum *Kompas*, 3 Oktober 2006.

membara akibat perbedaan-perbedaan itu. Apalagi di era reformasi seperti pada saat ini dengan dilandasi semangat kedaerahan, menjadikan permasalahan semakin pelik. Sementara pendekatan yang dilakukan pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan keamanan sehingga sulit untuk dapat menyentuh pada akar permasalahan.

Berbagai konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia selama ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan masalah kebudayaan. Akibat perbedaan latar belakang budaya timbullah kesenjangan di berbagai bidang, terutama dibidang sosial, politik dan ekonomi yang akhirnya menjadi pemicu konflik horisontal yang dilandasi kecemburuan. Setiap kebudayaan yang menjadi kerangka dasar pola berpikir dan bertingkah laku manusia sebenarnya di dalamnya mengandung nilai-nilai universal yang disebut kearifan lokal (*local wisdom*).²⁷

Kearifan lokal ini dalam kehidupan nyata berupa terwujudnya kehidupan yang teratur sesuai dengan norma-norma dan sistem nilai yang menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku. Dalam kehidupan orang Tionghoa, walaupun karakteristik etnik Tionghoa identik dengan individualis dan eksklusif, sebenarnya memiliki nilai humanistik dalam bersosialisasi dengan sesamanya walaupun berbeda etnik. Fenomena ini tampak ketika mereka hidup dan bergaul bersama etnis lain di wilayah kebudayaannya sendiri.

²⁷Ayu Sutarto, *Menjinakkan Globalisasi* (Jember: Kompyawisda dan Universitas Jember, 2002), hlm. 23.

Benarkah berbagai kerusuhan rasial dalam rentang sejarah Indonesia yang pada umumnya menempatkan kaum Tionghoa sebagai korban merupakan konflik rasial ataukah semua itu semata-mata lebih merupakan konflik sosial yang kebetulan terjadi di antara dua ras (Tionghoa dan pribumi) sebagai akibat ketimpangan (ekonomi).²⁸

Kenyataan bahwa teori-teori rasis adalah palsu tidaklah menutup kemungkinan terjadinya konflik-konflik rasial. Akan tetapi, konflik-konflik rasial tidaklah seperti apa yang diyakini oleh kaum rasis yaitu sebagai konflik antara ras-ras yang lebih rendah dan ras-ras yang lebih tinggi melainkan konflik-konflik tersebut merupakan konflik-konflik antara ras-ras yang berbeda-beda.²⁹

Pada masa pendudukan Belanda, penduduk Hindia Belanda memang dikelompok-kelompokkan menjadi tiga golongan. Ras Timur Asing yang terdiri dari terutama orang-orang Tionghoa dan Arab oleh Pemerintah Hindia Belanda diposisikan sebagai golongan yang lebih tinggi daripada golongan pribumi. Sementara golongan *Netherland* diposisikan sebagai golongan paling tinggi di antara ketiga golongan tersebut. Atas dasar apakah pemerintah Hindia Belanda menentukan kelas-kelas sosial semacam itu? Tampaknya, pemerintah Hindia Belanda dengan sadar melakukan hal tersebut sebagai

²⁸Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 209.

²⁹Mohammad Hatta dalam artikelnya yang berjudul "Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa" tahun 1957 menyatakan bahwa "kamu pribumi Indonesia telah berkorban bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin memperbaiki nasibnya (secara ekonomis) tetapi mendapati bahwa kaum minoritas Tionghoa menghadang jalannya. Lihat: Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 4. Sementara itu, Sunarid (Menteri Luar Negeri dalam kabinet Alisatro Amijoyo) menyatakan bahwa "Orang Tionghoa hidup dalam kecukupan sedangkan orang Indonesia asli hidup dalam kemiskinan. Hal itulah yang menumbuhkan ketegangan rasial. *Ibid.*, hlm. 223.

implementasi dari politik *Divide et Impera*. Dengan kata lain, tanpa mengabaikan faktor-faktor objektif semacam cara hidup, tingkat sosial-ekonomi, mental dan kepribadian, faktor politis merupakan faktor paling dominan yang membuat pemerintah Hindia Belanda menciptakan pengelompokan-pengelompokan seperti di atas.

Namun, mengapakah kemudian harus selalu etnis Tionghoa yang menjadi sasaran dalam setiap kerusuhan rasial? Tentu saja tidak ada jawaban tunggal untuk persoalan ini sebagaimana tidak ada jawaban tunggal untuk persoalan-persoalan sosial yang lain. Tetapi, dengan mencermati ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh para tokoh sejarah, setidaknya-tidaknya bisa diduga bahwa unsur ketimpangan ekonomilah yang menjadi faktor dominan terjadinya kerusuhan-kerusuhan di atas.

Dalam kasus di atas, teori konflik sosial yang dikembangkan Karl Marx mendapatkan konteksnya. Bagi Marx, sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis Suseno, bidang ekonomi merupakan bidang yang akan menentukan kehidupan politik dan pemikiran masyarakat.³⁰ Marx juga berkeyakinan bahwa “Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka.”³¹

Ketika realitas kehidupan ekonomi menyadarkan orang-orang pribumi akan posisinya yang lebih rendah dan lemah dibandingkan dengan kehidupan ekonomi orang-orang Tionghoa, potensi konflik sosial telah tertanam di sana. Apalagi bila benar bahwa akibat penjajahan dan politik *Divide et Impera*

³⁰Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 51.

³¹*Ibid.*, hlm. 138.

pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat pribumi memendam konflik batin yang pada akhirnya akan berkembang ke dalam kecenderungan-kecenderungan agresi dan dominasi,³² tidak susah dimengerti bahwa hanya karena dipicu oleh hal-hal yang tampak sangat sepele (misalnya perkelahian pemuda) kerusuhan rasial pun begitu mudah membara di dalam masyarakat Indonesia.

Para penganut Marxisme meyakini bahwa revolusi sosial akhirnya memang akan terjadi sebagai akibat pertentangan dalam bidang ekonomi antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Dalam beberapa segi, keyakinan tersebut mendapat legitimasi sejarah sekalipun perlu dicatat bahwa ketimpangan ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya antagonisme sosial.³³

Oleh karena itu, sebagaimana digambarkan oleh Leo Suryadinata bahwa ada kesan di benak orang-orang pribumi bahwa orang-orang Tionghoa yang dipandang sebagai “tamun” justru hidup jauh lebih makmur daripada orang-orang pribumi sebagai tuan rumah. Tak dapat disangkal bahwa beberapa di antara mereka memang hidup secara eksklusif—sekalipun harus segera dicatat bahwa eksklusivisme bukanlah semata-mata milik orang Tionghoa. Di samping itu, etnis Tionghoa memang sangat patuh dan konsisten dalam mempertahankan kebudayaan dan adat-istiadat yang diwarisi dari leluhurnya.³⁴ Akan tetapi, keberadaan etnis China di Yogyakarta tampaknya berbeda dengan yang berdomisili di tempat lain. Mereka lebih adaptif terhadap karakteristik budaya yang berlaku pada masyarakat Yogyakarta.

³²Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hlm. 158.

³³*Ibid.*, hlm. 203.

³⁴Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm. 7.

Dari perjalanan sejarah akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Yogyakarta selama ini tampaknya berlangsung damai dan akulturatif. Hal ini ditandai dengan tidak pernah terjadi konflik di Yogyakarta antara kedua pendukung kebudayaan tersebut.

Berangkat dari kerangka teori ini, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya adaptasi budaya merupakan kunci atas terwujudnya harmonisasi sosial. Terjadinya disharmonisasi hubungan antar etnik sehingga menimbulkan konflik sosial di berbagai tempat dapat dijelaskan dengan pendekatan budaya. Penggunaan pendekatan budaya dalam mengkaji hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan kelompok etnik lain ini, selanjutnya dapat dijadikan model dalam mengkaji pola-pola hubungan antar etnik yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskriminasi struktural telah terbukti justru semakin memupuk rasa saling bermusuhan dan bukannya mendekatkan keduanya.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil penyelidikan secara ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran.³⁵ Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta menggunakan data kepustakaan serta penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Yogyakarta.

³⁵Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1964), hlm. 14.

Penggunaan metode penelitian dalam karya ilmiah ini secara lebih rinci dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)³⁶ dan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder. Literatur primer yang dimaksud adalah karya-karya yang mengkaji tentang komunitas etnis Tionghoa, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel. Untuk mendukung data primer, penulis menggunakan buku-buku yang mengupas dan memberi komentar seputar komunitas etnis Tionghoa sebagai data sekunder. Literatur sekunder merupakan literatur pembantu yang juga dapat diambil dari buku-buku, makalah, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian pembahasan karya ilmiah ini. Sementara tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan buku, hasil penelitian, jurnal maupun artikel yang membicarakan Tionghoa. Pengumpulan sumber ini menurut Kuntowijoyo dibagi ke dalam sumber primer dan sumber sekunder.³⁷

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

³⁶Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

³⁷Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 96.

Wawancara atau interview digunakan dalam rangka menggali informasi secara lebih detail dan mendalam dari subjek penelitian (informan) sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Sudarman Danim mengatakan bahwa wawancara merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data. Sebab wawancara berfungsi sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen dan lain sebagainya.³⁸ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat *free interview*,³⁹ yakni bersifat informal, terbuka dan terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara seperti percakapan biasa, dan waktu yang digunakan disesuaikan dengan kesepakatan peneliti dengan sumber informasi, sehingga sumber dengan leluasa mengungkapkan, mengurai, dan menjelaskan. Pelaksanaan wawancara ini menggunakan instrumen yang berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi, memperoleh respon dan informasi tentang komunitas etnis Muslim-Tionghoa. Adapun yang diwawancarai dalam hal ini orang-orang Muslim-

³⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

³⁹*Free interview* adalah jenis wawancara tak berstruktur, di mana pewawancara yang memakai teknik ini biasanya hanya dibimbing oleh *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin dipersoalkan oleh pewawancara. Lihat J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 93. Dalam hal ini Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa *free interview* adalah teknik wawancara yang tidak mempunyai pusat, pertanyaan yang diajukan biasanya berpindah-pindah dari satu pokok masalah ke pokok masalah lain, sementara data yang diperoleh bisa beragam. Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 139.

Tionghoa, bahkan mungkin lintas iman atau warga Tionghoa yang non-Muslim.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern.⁴⁰ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian data. Data dalam bentuk tulisan kemudian dicocokkan dengan tahun terbit, sedangkan data dari wawancara dicek dengan melihat kredibilitas orang yang diwawancarai. Adapun kritik intern yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran data dilakukan dengan membanding-bandingkan berbagai sumber yang ada, sumber yang paling banyak disebut diyakini sebagai sumber yang lebih bisa dipercaya.

4. Interpretasi (Analisis Data)

Data yang telah terkumpul ditafsirkan (interpretasi) berdasarkan kerangka teori yang disebutkan di atas.⁴¹ Interpretasi ini akan ditempuh dengan menganalisa data dari berbagai sumber yang diperoleh, kemudian mensintesis (menyatukan fakta) sehingga didapat sebuah interpretasi yang objektif dan relevan dengan topik permasalahan.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah menyampaikan sintesa-sintesa dalam bentuk kisah.⁴² Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat

⁴⁰Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penulisan Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 99.

⁴¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 100.

⁴²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Noto Susanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32

oleh penulis. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa.

G. Sistematika Pembahasan

Studi terhadap komunitas etnis Muslim-Tionghoa dalam perspektif sejarah, terutama pasca reformasi 1998 yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Batasan dan rumusan masalah dalam rangka memberikan batasan-batasan tentang permasalahan yang diangkat. Tujuan dan kegunaan penelitian menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi secara teoritis–metodologis dalam penelitian ini. Kajian pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara intelektual-akademis memiliki tingkat signifikansi yang cukup urgen dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teori, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari

teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab dua, menggambarkan tentang komunitas Tionghoa di Indonesia dalam lintasan sejarah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Asal-usul masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia, sejarah islamisasi di komunitas etnis Tionghoa dan relasi komunitas etnis Tionghoa dengan pribumi. Bab ini akan diurai secara panjang lebar sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Nusantara hingga proses islamisasi di komunitas Tionghoa serta hubungannya dengan warga pribumi.

Bab tiga, merupakan gambaran umum seputar kebijakan pemerintah dan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Bab ini teradiri dari tiga sub bab, meliputi: Tionghoa Era VOC, Era Orde Lama, Era Orde Baru hingga Era Reformasi sekarang ini. Bab ini mengkaji tentang kondisi kehidupan sosial politik etnis Tionghoa mulai dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. Untuk melengkapi pembahasan ini juga dikaji soal kebijakan pemerintah Indonesia terhadap warga non pribumi.

Bab empat merupakan telaah tentang peranan Muslim-Tionghoa dalam perubahan sosial dan politik di Yogyakarta. Di dalamnya dikemukakan tentang relasi etnis Tionghoa dengan warga Yogyakarta, peran etnis Tionghoa dalam perubahan sosial di Yogyakarta. Untuk sampai kepada analisis ini akan dilihat bagaimana peranan Muslim-Tionghoa di Yogyakarta dalam perubahan

sosial. Bab ini juga akan mengkaji keterlibatan etnis Tionghoa dalam persoalan politik. Untuk melengkapi pembahasan bab ini juga diteliti siapa saja yang terlibat dalam politik praktis, baik yang duduk di eksekutif, legislatif, serta pengurus partai politik.

Pada bagian akhir dari skripsi ini adalah sebagai penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis serta penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dan saran-saran juga tertuang dalam bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Indonesia tidak ada catatan pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang ke Nusantara, begitu juga ke Yogyakarta. Namun gelombang kedatangan besar-besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi pada Abad XVI khususnya di pulau Jawa.

Proses interaksi serta asimilasi etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung asimilasi yaitu toleransi, sikap menghormati serta perkawinan campuran. Persamaan unsur-unsur budaya antara masyarakat pribumi dan orang Tionghoa di antaranya dalam bahasa, sistem teknologi (arsitektur rumah), dan sistem mata pencaharian (pembuatan batik).

Sementara proses islamisasi di kalangan etnis Tionghoa dipengaruhi karena proses interaksi antar etnis Tionghoa yang sudah ada di Nusantara dengan pribumi yang beragama Islam, meskipun ada juga etnis Tionghoa beragama Islam datang dari negeri Cina adalah bertujuan untuk menyampaikan Islam atau berdakwah di bumi Nusantara ini.

Dinamika etnis Tionghoa di bumi Nusantara ini mengalami pasang-surut, sejak masa VOC, Orde Lama, Orde Baru hingga menjelang era reformasi 1998. Kedudukan etnis Tionghoa selalu mengalami alienasi dari

politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun di Yogyakarta kondisinya memang agak berbeda dengan daerah lain, seperti di kota-kota besar terutama di Semarang, Surabaya, Malang, dan seterusnya. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah memperlemah kekuasaan politik Sultan, tetapi Sultan tetap mempunyai otoritas terhadap rakyatnya. Di kota ini Belanda tidak mempertahankan kekuasaan secara langsung, melainkan masih terbatas pada kontrak-kontrak politik dan mencegah campur tangan langsung terhadap urusan intern raja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Di era reformasi ada angin segar bagi orang-orang Cina peranakan yang tinggal menetap turun-temurun di Indonesia, yang telah berhasil memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang Cina, melainkan disebut sebagai orang Tionghoa. Di samping itu, karena alasan hak asasi manusia dan sikap non-diskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnisitas saja.

Era reformasi 1998 minat dan kesadaran politik etnis Tionghoa di Yogyakarta mulai tumbuh, munculnya tokoh etnis tionghoa yang menjadi wakil rakyat di DPR propinsi Yogyakarta. Secara umum warga etnis Tionghoa di Yogyakarta masih bersikap skeptis terhadap politik praktis serta masih bingung dalam menentukan pilihan, walaupun telah memiliki kebebasan dalam menentukan pandangan politiknya.

Fenomena yang menarik dan perlu dicatat adalah bahwa, bermunculan beberapa nama anggota DPR baik di tingkat lokal maupun pusat dari kalangan etnis Tionghoa. Di Yogyakarta geliat partisipasi politik masyarakat Tionghoa terus bergerak dinamis dengan tampilnya beberapa tokoh etnis Muslim Tionghoa.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks kehidupan sosial politik Muslim-Tionghoa di Yogyakarta pasca reformasi 1998-2008.

Pertama, bagi para kaum akademik; mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, hasil dari penelitian ini merupakan tambahan wacana metodologis dalam studi etnis Tionghoa. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang sejarah dan dinamika etnis Tionghoa di masa mendatang.

Kedua, hasil penelitian ini setidaknya juga memiliki kelayakan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda.

Terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini kurang sempurna. Namun dari kekurangsempurnaan tersebut, diharapkan akan dapat ditemukan sisi lain yang dapat menjadi bahan penelitian oleh peneliti lain yang *concern* pada dinamika etnis Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Adam, Asvi Warman, “Cina Absen Dalam Pelajaran Sejarah”, Koran Tempo, 12 Februari 2002.
- Al-Qartuby, Sumanto, *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara abad XVI*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Anwar, Rosihan, *Quartet: Pertemuan dengan Empat Sahabatku*, Jakarta: Yayasan Soedjatmoko, 1999.
- Azra, Azyumardi, “Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia”, Makalah disampaikan pada Orasi Budaya, diselenggarakan oleh *Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE)*, Yogyakarta: 30 Agustus 2007.
- Budiman, Amen, *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*, Semarang: Tanjung Sari, 1979.
- Chang, William, “Etnonasionalisme” (6),. Jakarta: *Harian Umum Kompas*, 3 Oktober 2006.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Darmasugito, “200 Tahun Kota Yogyakarta (7-10-1756 – 7-10-1956)” Yogyakarta: Kanisius, 1956.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Emmeson, Donald K. (ed), *Indonesia, Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ekadjati, Edi S. *Sejarah Kabupaten Tangerang*, Pemda Tangerang: 2004.
- Falah, Fajrul, *dkk. Pandangan Muslim Tionghoa Terhadap Perayaan Imlek*, Surakarta: Fakultas Ushuluddin UMS, 2007.
- Greif, Stuart W., *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Gie, Soe Hok, *Di Bawah Lentera Merah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.

- _____, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007.
- Hall, G.E., *Sejarah Asia Tenggara*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh I.P.Soewarsha, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- J. Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Jahja, Junus, "3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa" dalam Junus Jahja (editor), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, Jakarta: YUI, 1984.
- Kehtani, Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Lan, Thung Lu, *Konstruksi "Cina" sebagai Pelaku Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Lombard, Dennis, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Terj. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Ling, Tan Swie, "Peran Tionghoa di Indonesia Dahulu dan Sekarang", Makalah dalam Seminar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Jakarta.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maulana, Reza "Pergulatan Menjadi Muslim Sejati", pendekatan Teori Konflik Dalam Keluarga Orang Tionghoa Muslim Di Yogyakarta, Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2007.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mim, John Ryan Bartholomew dan Alif Lam, *Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2001.
- Muhlis, Imam, "Islam dan Pancasila: Perspektif Ahmad Syafii Maarif," *Jurnal Maarif*, Vol. 3, No. 2 Mei 2008.
- Nazir, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Padmodiwiryo, Suharyo, *Memoir Haryo Kecik Volume 1*, Jakarta: Obor, 1995.
- Peter, Carey, 1986, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*, Jakarta: Pustaka Azit.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman, *Kasultanan Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Sutarto, Ayu, *Menjinakkan Globalisasi*, Jember: Kompyawisda dan Universitas Jember, 2002.
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Sejarah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sukanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*, Jakarta: 1952.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1964.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Setiono, Benny G, *Etnis Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia*, Makalah disampaikan pada Diskusi Akbar yang diselenggarakan Perhimpunan INTI Jakarta pada tanggal 27 April 2002, Jakarta.
- _____, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2003.
- _____, *Partisipasi Sosial Politik Dan Ekonomi Etnis Tionghoa Di Era Reformasi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Peranan Ekonomi dan Politik Tionghoa Indonesia: Dialektika Politik Etnis dan Globalisasi “diselenggarakan oleh Sinology Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2004.
- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitipers, 1984.
- _____, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1895.
- _____, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, terj: Dede Oetomo, Jakarta: Gramedia, 1988.
- _____, *Etnis Tionghoa Asli dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1999.

- _____, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian Hien*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- _____, *Negara dan Etnis Tionghoa*, cet-I. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Surjomihardjo, Abdurrachman, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe – Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Penerbit: Komunitas Bambu, 2008.
- Surjomihardjo, *Sarekat Islam Lokal*, tp penerbit. Tahun 1975.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Tan, Mely G., (ed). *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979.
- Toer, Pramoedya Ananta, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1998.
- _____, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia. Jilid I*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 1999.
- Wahono, Riyanto (ed), *70 Tahun Junus Yahya: Pribumi Kuat Kunci Pembauran*, Jakarta: Bima Rena Pariwisata.
- Wahyuningsih, Sri, “Wayang: Wibawa, Seni Dan Kekuasaan (Kajian Antropologi Politik)”, makalah disampaikan pada acara seminar Budaya di Fak. Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, pada 22 Juni 2009.
- Werdojo, Tan Jin Ding T, *Dari Kapitein Cina sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: PT. Pustaka Utama, Grafiti, 1990.
- Williams, Lea E., *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia, 1900-1916*, Glencoe: 1960.
- Yudawati, Triana, “Relasi Muslim Tionghoa dan Tionghoa Non-Muslim di Kodya Yogyakarta”, Yogyakarta: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2001.
- Zein, Abdul Gaqir, , *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta: 2000, Prestasi Insan Indonesia.
- Zuhdi, Darmiyati, *Penelitian Analisis Kontent*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993.

Wawancara

Wawancara dengan H Budi Setyagraha pada tanggal 8 Mei 2010.

Wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Juni 2010.

Wawancara dengan Sukma Umbara pada tanggal 16 Juni 2010.

Surat Kabar dan Website

Harian Umum *Suara Merdeka*, 12 Februari 2000.

Harian Umum *Kompas*, 11 Mei 2000.

Harian Umum *Kompas*, 11 Mei 2000.

<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 6 Februari 2010

<http://www.muslimtionghoa.com>, diakses pada tanggal 22 Mei 2010

<http://iccsq.wordpress.com>, diakses pada 8 April 2010

<http://id.inti.or.id/pusatdata>, diakses pada tanggal 6 Mei 2010

<http://us.ard.yahoo.com>, diakses pada 6 Mei 2010

<http://www.conflictrecovery.org/Iqbal.doc>, diakses pada 5 Mei 2010

<http://www.indonesiamedia.com/2008/7/early/opini/>, diakses pada 14 Mei 2010

Lihat, www.rsyap.or.id, diakses pada 22 Mei 2010.

<http://pitiyogya.blogspot.com-chinese-moslem> diakses pada tanggal 6 Mei 2010

DAFTAR INFORMAN

Nama : H. Budi Setyagraha
Alamat : Jl. Kyai Mojo No:14, Jetis, Bantul, Yogyakarta
Umur : 57
Jabatan : Sekretaris Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

Nama : Novita
Alamat : Jl. Petung No: 8, Depok, Sleman, Yogyakarta
Umur : 40
Jabatan : Pengusaha mini market

Nama : Sukma
Alamat : Jl. Pedak No. 16 Karangbendo, Banguntapan Bantul Yogyakarta
Umur : 35
Jabatan : Karyawati

Nama : Hj. Rachana Fatimah
Alamat : Jl. Kyai Mojo No:14, Jetis, Bantul, Yogyakarta
Umur : 50
Jabatan : Ketua umum PITI Yogyakarta

Nama : Abidin (Bambang)
Alamat : Demangan kidul GK I/583 Yogyakarta
Umur : -
Jabatan : Dagang

Nama : Rudiyanto
Alamat : JL. D.I. Panjaitan 34 mantri teron, Yogyakarta
Umur : 45
Jabatan : Pengusaha

Nama : Abdurahman Kwik
Alamat : Jl. Glagah sari 43 Yogyakarta
Umur : 42
Jabatan : Pengusaha Bengkel

Nama : Sia Pien Hwa
Alamat : Cokrokusuman baru ct 2/980 A Yogyakarta
Umur : -
Jabatan : Pedagang

Nama : chie ing
Alamat : Nologaten,Depok,Sleman Yogyakarta
Umur : 45
Jabatan : Pedagang

Nama : Hery Tanuwijaya
Alamat : Samirono, CT 6 No: 91
Umur : 24
Jabatan : Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Ahmad Sidik Tri Haryanto
Tempat tanggal lahir : Karawang, 08 Agustus 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Cikalong 1, Cikalong sari, Jatisari
Karawang Jawa Barat
Jenis kelamin : Laki-laki
Nama orang tua
Ayah : Mukarto
Ibu : Badilah

B. Riwayat pendidikan

1. SDN Cikalongsari 1996
2. SMPN 1 Jatisari 1999
3. SMAN 1 Cikampek 2002
4. UIN Sunan Kalijaga masuk 2004

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY) 2005-2007
2. UKM PPS. CEPEDI (Cepat Pembelaan Diri) UIN Sunan Kali Jaga

D. Prestasi

1. Medali Emas Pencak Silat Porprop DIY 2005 (Beregu Putra)
2. Medali Emas Pencak Silat Porprop DIY 2007 (Beregu Putra)
3. Medali Emas Pencak Silat Porprop DIY 2009 (Beregu Putra)
4. Medali Perak Kejurna Pencak Silat Mahasisiwa